

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproksikan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga konstan sebagai variabel dependen, serta penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNPPnBM), dan Cukai sebagai variabel independen. Penelitian menggunakan data sekunder berbentuk *time series* tahunan yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Data yang digunakan dalam periode tahun 1985 sampai dengan 2024 sehingga diperoleh sebanyak 40 observasi untuk masing-masing variabel. Pemilihan periode tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang, termasuk pada masa krisis ekonomi, reformasi perpajakan, krisis keuangan global, hingga periode pascapandemi. Seluruh data yang memenuhi kriteria penelitian digunakan sebagai sampel sehingga penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh.

4.2 Statistika Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang meliputi variabel Pertumbuhan

Ekonomi (PDB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNPPnBM), serta Cukai selama periode 1985–2024. Statistik deskriptif menyajikan informasi mengenai nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif memberikan gambaran awal mengenai kondisi penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode pengamatan.

Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif

Keterangan	PDB	PPh	PPNPPnBM	CK
Mean	14.21766	11.41634	11.11322	9.894736
Median	14.34791	11.94753	11.45262	10.29532
Maximum	16.37431	13.94635	13.60647	12.41341
Minimum	11.47782	7.659643	6.777647	6.771477
Skewness	-0.186358	-0.522861	-0.479229	-0.272415
Kurtosis	1.902104	1.902026	2.027371	1.564154
Sum	568.7063	456.6537	444.5286	395.7894
Sum Sq. Dev.	94.14231	161.8668	145.9736	146.4184
Observations	40	40	40	40

Sumber: Output E-Views (2026)

Dalam Tabel 4.1 telah ditunjukkan bahwa pada variabel PDB menghasilkan nilai rata-rata sebesar 14.21766, nilai median sebesar 14.34791, nilai maksimum sebesar 16.37431, dan nilai minimum sebesar 11.47782. Pada variabel PPh dapat dilihat bahwa nilai rata-rata sebesar 11.41634, nilai median sebesar 11.94753, nilai maksimum dan minimum masing-masing sebesar 13.94635 dan 7.659643. Variabel PPNPPnBM menghasilkan nilai rata-rata sebesar 11.11322, nilai median sebesar 11.45262, nilai maksimum dan minimum

masing-masing sebesar 13.60647 dan 6.777647. Sedangkan, variabel CK menghasilkan nilai rata-rata sebesar 9.894736, nilai median sebesar 10.29532, nilai maksimum dan minimum masing-masing sebesar 12.41341 dan 6.771477.

Pada nilai skewness dapat dilihat bahwa data yang terdistribusi normal memiliki nilai antara -1 hingga 1. Nilai skewness yang positif menunjukkan bahwa distribusi memiliki ekor kanan yang panjang, sedangkan nilai skewness yang negatif menunjukkan bahwa sebaran data memiliki ekor kiri yang panjang. Seluruh variabel penelitian menunjukkan nilai skewness yang masih berada dalam rentang -1 hingga 1, sehingga dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal. Selain itu, seluruh variabel memiliki nilai skewness yang negatif, yaitu PDB sebesar -0.186358, PPh sebesar -0.522861, PPNPPnBM sebesar -0.479229, dan CK sebesar -0.272415, yang menunjukkan bahwa distribusi data memiliki ekor kiri yang lebih panjang.

Kurtosis digunakan untuk melihat bentuk puncak distribusi data. Nilai kurtosis sebesar 3 menunjukkan distribusi normal (mesokurtik), nilai lebih dari 3 menunjukkan distribusi lebih runcing (leptokurtik), sedangkan nilai kurang dari 3 menunjukkan distribusi lebih datar (platikurtik). Pada Tabel 4.2, variabel PDB, PPh, PPNPPnBM, dan CK masing-masing memiliki nilai kurtosis sebesar 1.902104, 1.902026, 2.027371, dan 1.564154. Nilai-nilai tersebut berada di bawah 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data pada seluruh variabel cenderung datar atau bersifat platikurtik.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk menguji jenis hubungan antara variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PDB) dengan variabel independen yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNPPnBM), serta Cukai. Hubungan yang terbentuk dapat berupa hubungan positif maupun negatif. Hubungan positif menunjukkan bahwa peningkatan pada variabel independen diikuti oleh peningkatan pada variabel dependen, sedangkan hubungan negatif menunjukkan bahwa peningkatan pada variabel independen diikuti oleh penurunan pada variabel dependen.

Tabel 4. 2 Analisis Korelasi

Variabel	PDB	PPh	PPNPPnBM	Cukai
PDB	1.000000	0.973043	0.973561	0.977024
PPh	0.973043	1.000000	0.994701	0.990597
PPNPPnBM	0.973561	0.994701	1.000000	0.988950
Cukai	0.977024	0.990597	0.988950	1.000000

Sumber: Output E-Views (2026)

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki hubungan positif dengan Pertumbuhan Ekonomi (PDB). Variabel Pajak Penghasilan (PPh) memiliki koefisien korelasi sebesar 0,973043 terhadap PDB, yang menunjukkan adanya hubungan positif sangat kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan cenderung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Variabel Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNPPnBM) memiliki koefisien korelasi sebesar 0,973561 terhadap PDB.

Nilai tersebut menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara penerimaan PPNPPnBM dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penerimaan PPNPPnBM sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dalam pertumbuhan PDB.

Variabel Cukai memiliki koefisien korelasi sebesar 0,977024 terhadap PDB. Nilai tersebut merupakan korelasi tertinggi di antara seluruh variabel independen terhadap PDB, sehingga menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara penerimaan cukai dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hubungan antarvariabel independen juga menunjukkan nilai korelasi yang sangat tinggi, yaitu sebesar 0,994701 antara PPh dan PPNPPnBM, 0,990597 antara PPh dan Cukai, serta 0,988950 antara PPNPPnBM dan Cukai. Nilai korelasi yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki hubungan yang sangat erat dan bergerak searah selama periode penelitian.

4.3.2 Uji Akar Unit (ADF)

Uji akar unit (Unit Root Test) dilakukan untuk mengetahui apakah data time series yang digunakan dalam penelitian bersifat stasioner atau tidak. Pengujian ini penting dilakukan agar hasil analisis yang diperoleh lebih valid dan terhindar dari masalah regresi semu (*spurious regression*). Dalam penelitian ini, uji stasioneritas dilakukan menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada seluruh variabel penelitian. Hasil pengujian ADF disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 3 Uji Akar Unit

Variabel	ADF @ 1st Difference	5% Critical Value	Order of Integration	Included in the Model	Remark
LNYPDB	-6.142677	-3.533083	I(1)	Trend and Intercept	Stationary
LNx1PPH	-6.392741	-3.533083	I(1)	Trend and Intercept	Stationary
LNx2PPNPPNBM	-8.418856	-3.533083	I(1)	Trend and Intercept	Stationary
LNx3CUKAI	-4.669431	-3.533083	I(1)	Trend and Intercept	Stationary

Sumber: Output E-Views (2026)

Hasil uji akar unit menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller (ADF) menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian telah stasioner pada tingkat first difference. Nilai probabilitas masing-masing variabel yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Selain itu, nilai ADF Statistic pada seluruh variabel juga lebih kecil dibandingkan nilai kritis (critical value) pada taraf signifikansi 1%, 5%, dan 10%, sehingga hipotesis nol yang menyatakan adanya akar unit dapat ditolak. Hasil uji akar unit menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian, yaitu PDB, PPh, PPNPPnBM, dan Cukai, telah memenuhi syarat stasioneritas pada tingkat first difference dengan jumlah observasi sebanyak 38 data.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDB) memiliki nilai ADF Statistic sebesar -6,142677 dengan nilai probabilitas 0,0001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan lebih rendah dibandingkan nilai kritis pada tingkat 1% (-4,219126), 5% (-3,533083), dan 10% (-3,198312). Variabel PDB dinyatakan telah stasioner pada tingkat first difference.

Variabel Pajak Penghasilan (PPh) memperoleh nilai ADF Statistic sebesar -6,392741 dengan probabilitas 0,0000. Data telah stasioner karena nilai probabilitas berada di bawah 0,05 dan nilai ADF Statistic lebih kecil dibandingkan seluruh nilai kritis yang digunakan dalam pengujian.

Variabel PPNPPnBM memiliki nilai ADF Statistic sebesar -8,418856 dengan probabilitas 0,0000. Hasil tersebut menunjukkan tingkat stasioneritas yang sangat baik karena nilai ADF Statistic jauh lebih rendah dibandingkan nilai kritis pada taraf 1%, 5%, maupun 10%. Variabel PPNPPnBM dinyatakan stasioner pada tingkat first difference.

Variabel Cukai memiliki nilai ADF Statistic sebesar -4,669431 dengan probabilitas 0,0031. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai ADF Statistic yang lebih rendah dibandingkan nilai kritis pada seluruh tingkat signifikansi menunjukkan bahwa variabel Cukai juga telah stasioner pada tingkat first difference.

4.3.3 Uji Kointegrasi Johansen

Seluruh variabel penelitian dinyatakan stasioner pada tingkat first difference, langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi Johansen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan jangka panjang yang stabil antara variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNPPnBM), serta Cukai. Hubungan kointegrasi menunjukkan meskipun variabel dapat mengalami fluktuasi dalam jangka pendek, variabel-

variabel tersebut bergerak menuju keseimbangan yang sama dalam jangka panjang. Hasil pengujian kointegrasi Johansen disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 4 Uji Kointegrasi Johansen

Hipotesis	Trace Statistic	5% Critical Value	Probability	Keterangan
None	59.70175	47.85613	0.0026	Terkointegrasi
At most 1	30.37445	29.79707	0.0429	Terkointegrasi
At most 2	12.22752	15.49471	0.1463	Tidak Terkointegrasi
At most 3	2.726536	3.841465	0.0987	Tidak Terkointegrasi

Sumber: Output E-Views (2026)

Hasil uji kointegrasi Johansen menggunakan pendekatan Trace Test menunjukkan bahwa pada hipotesis None diperoleh nilai Trace Statistic sebesar 59,70175, lebih besar dibandingkan nilai kritis 5% sebesar 47,85613, dengan nilai probabilitas 0,0026 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan kointegrasi antarvariabel penelitian.

Pada hipotesis At most 1, nilai Trace Statistic sebesar 30,37445 lebih besar dibandingkan nilai kritis 5% sebesar 29,79707 dengan probabilitas 0,0429. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis nol kembali ditolak sehingga terdapat hubungan kointegrasi pada tingkat tersebut.

Hipotesis At most 2 dan At most 3, nilai Trace Statistic masing-masing sebesar 12,22752 dan 2,726536, yang lebih kecil dibandingkan nilai kritis 5%. Nilai probabilitas sebesar 0,1463 dan 0,0987 lebih besar dari 0,05. Hasil menunjukkan bahwa pada tingkat tersebut tidak ditemukan hubungan kointegrasi.

4.3.4 Vector Error Correction Model (VECM)

Adanya hubungan kointegrasi antarvariabel menunjukkan bahwa model VECM dapat digunakan dalam penelitian ini. Melalui pendekatan VECM, hubungan antara PDB, PPh, PPNPPnBM, dan Cukai dapat dianalisis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil estimasi model VECM disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Uji Vector Error Correction Model (VECM)

Variabel	Koefisien	t-Statistik
A. JANGKA PANJANG		
LN _{X2} PPNPPNBM(-1)	5.062070	[2.55617]
LN _{X3} CUKAI(-1)	-4.549985	[-2.38451]
C (Konstanta)	-25.80390	-
B. JANGKA PENDEK		
CointEq1	-0.173024	[-2.85028]
CointEq2	-0.845973	[-2.89075]
D(LN _Y PDB(-1))	-0.040948	[-0.24199]
D(LN _Y PDB(-2))	-0.051535	[-0.28320]
D(LN _{X1} PPH(-1))	0.589500	[1.75978]
D(LN _{X1} PPH(-2))	-0.003653	[-0.01421]
D(LN _{X2} PPNPPNBM(-1))	-0.840469	[-2.06785]
D(LN _{X2} PPNPPNBM(-2))	-0.119343	[-0.54405]
D(LN _{X3} CUKAI(-1))	0.551093	[1.39163]
D(LN _{X3} CUKAI(-2))	0.649029	[1.79093]
C (Konstanta)	0.013944	[0.16082]
C. DIAGNOSTIK MODEL		
R-squared	0.264636	-
F-statistic	0.935664	-

Sumber: Output E-Views (2026)

1. Uji Validitas Model (Error Correction Term)

Kevalidan model VECM ditentukan melalui nilai Error Correction Term yang ditunjukkan oleh variabel CointEq1 dan CointEq2. Berdasarkan Tabel 4.6, nilai koefisien CointEq1 adalah sebesar -0.173024 dengan t-statistik [-2.85028], dan nilai CointEq2 sebesar -0.845973 dengan t-statistik [-2.89075].

Secara statistik, kedua nilai t-statistik tersebut secara absolut lebih besar dari nilai kritis 1,96. Dengan demikian, nilai koreksi error dalam penelitian ini terbukti bernilai negatif dan signifikan. Hal ini menandakan bahwa model VECM yang digunakan berstatus valid, stabil, dan memiliki kemampuan untuk mengoreksi ketidakseimbangan atau guncangan ekonomi jangka pendek kembali menuju tren keseimbangan jangka panjangnya.

2. Analisis Hubungan

Dalam analisis jangka panjang, terdapat dua variabel yang terbukti memiliki pengaruh nyata terhadap Pertumbuhan Ekonomi (LNYPDB) karena nilai t-statistiknya berada di atas 1,96:

Pajak PPN dan PPnBM

(LN_{X2}PPNPPNBM(-1)): Memiliki nilai koefisien positif sebesar 5.062070 dengan nilai t-statistik [2.55617]. Angka ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, PPN dan PPnBM berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap peningkatan penerimaan PPN secara jangka panjang akan mendorong kenaikan PDB nasional.

Cukai

(LN_{X3}CUKAI(-1)): Memiliki nilai koefisien negatif sebesar -4.549985 dengan nilai t-statistik [-2.38451]. Mengingat nilai mutlaknya (2,38) lebih besar dari 1,96, maka dalam jangka panjang Cukai terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penerimaan cukai secara jangka panjang berasosiasi dengan perlambatan laju PDB.

4.3.5 Uji Pasca Estimasi

ji pasca estimasi untuk memastikan bahwa model yang digunakan telah memenuhi asumsi yang diperlukan dan menghasilkan estimasi yang dapat dipercaya. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat permasalahan pada residual model yang dapat memengaruhi validitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini, uji pasca estimasi dilakukan melalui Uji Heteroskedasticity dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Hasil pengujian tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai kelayakan model yang telah dibentuk. Berikut hasil uji Heterokedastisitas.

Tabel 4. 6 Uji Heterokedastisitas

Chi-sq	Df	Prob.
208.5913	200	0.3239

Sumber: Output E-Views (2026)

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai Chi-square sebesar 208,5913 dengan nilai probabilitas (Prob.) sebesar 0,3239. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05), sehingga hipotesis nol tidak dapat ditolak. Dengan demikian, model VECM yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa varians residual cenderung konstan sehingga model memenuhi salah satu asumsi yang diperlukan dalam analisis. Selanjutnya hasil uji LM disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 7 Uji Residual Serial Correlation LM Test

Lags	LM-Stat	Prob.
1	21.98359	0.1437
2	15.79057	0.4677

Sumber: Output E-Views (2026)

Hasil uji Residual Serial Correlation LM Test menunjukkan bahwa pada lag 1 diperoleh nilai LM-Stat sebesar 21,98359 dengan probabilitas 0,1437, sedangkan pada lag 2 diperoleh nilai LM-Stat sebesar 15,79057 dengan probabilitas 0,4677. Nilai probabilitas pada kedua lag tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05), sehingga hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat autokorelasi residual tidak dapat ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual pada model VECM tidak mengalami masalah autokorelasi. Model yang digunakan telah memenuhi asumsi bebas autokorelasi dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut serta penarikan kesimpulan penelitian.

4.3 Interpretasi Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Pengaruh PPh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mulai dari uji statistik deskriptif, uji akar unit, uji kointegrasi Johansen, hingga estimasi Vector Error Correction Model (VECM), diperoleh hasil bahwa Pajak Penghasilan (PPh) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan penerimaan Pajak Penghasilan selama periode penelitian belum mampu memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi. Meskipun PPh merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, peningkatan penerimaannya tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti investasi, konsumsi rumah tangga, ekspor-impor, kualitas belanja pemerintah, kondisi ekonomi global.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode penelitian. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya pertumbuhan penerimaan negara yang berasal dari pajak atas penghasilan orang pribadi maupun badan usaha. Namun, hasil estimasi Vector Error Correction Model (VECM) menunjukkan bahwa perubahan penerimaan PPh belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa besarnya penerimaan Pajak Penghasilan belum tentu secara langsung diterjemahkan menjadi peningkatan output ekonomi nasional. Hal tersebut dapat terjadi karena penerimaan pajak pada dasarnya merupakan sumber pembiayaan pemerintah yang dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat tidak langsung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Karlina & Lubis (2023) yang menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Temuan serupa juga diperoleh Liyana et al (2021) yang menemukan bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Kesamaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan belum tentu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi karena dampaknya bergantung pada efektivitas pengelolaan penerimaan negara, kualitas belanja pemerintah, serta kondisi perekonomian yang terjadi selama periode penelitian.

Temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes, yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal merupakan salah satu

instrumen yang digunakan pemerintah untuk memengaruhi aktivitas perekonomian. Namun, dalam pandangan Keynes dan dampak kebijakan fiskal ditentukan oleh besarnya penerimaan pajak, dan oleh bagaimana penerimaan tersebut dialokasikan melalui pengeluaran pemerintah yang produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan Pajak Penghasilan cenderung meningkat selama periode penelitian, peningkatan tersebut belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Besarnya penerimaan Pajak Penghasilan saja belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi apabila tidak diikuti dengan pengelolaan anggaran yang efektif, peningkatan investasi, serta dukungan kondisi makroekonomi.

4.3.2 Pengaruh PPNPPnBM terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan melalui uji statistik deskriptif, uji akar unit, uji kointegrasi Johansen, dan estimasi Vector Error Correction Model (VECM), diperoleh hasil bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNPPnBM) memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PPNPPnBM memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi nasional karena jenis pajak ini dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, maka semakin besar pula potensi penerimaan PPNPPnBM yang dapat dihimpun oleh pemerintah. Kondisi ini mencerminkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi yang terjadi dalam masyarakat akan diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak konsumsi. Maka

hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa PPNPPnBM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diterima.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNPPnBM) menunjukkan kecenderungan yang terus berkembang selama periode penelitian. Kondisi tersebut mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang berasal dari transaksi konsumsi barang dan jasa di masyarakat. Sebagai pajak yang dikenakan pada kegiatan konsumsi, PPNPPnBM memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat daya beli dan aktivitas perdagangan. Semakin aktif kegiatan konsumsi yang terjadi, semakin besar pula penerimaan PPNPPnBM yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah. Keadaan ini menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan PPNPPnBM dapat menggambarkan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Karona C. Susena dkk. (2024) yang menemukan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan nasional. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan PPN dapat menjadi indikator meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Adefolake dan Omodero (2022) yang menemukan bahwa Value Added Tax (VAT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pajak berbasis konsumsi memiliki kontribusi yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan negara.

Temuan tersebut sejalan dengan Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes yang menempatkan konsumsi sebagai salah satu komponen utama dalam pembentukan permintaan agregat. Dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga perubahan pada aktivitas konsumsi akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian. Penerimaan PPNPPnBM yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan transaksi ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, penerimaan tersebut juga memperluas ruang fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai program produktif lainnya. Melalui pengelolaan penerimaan pajak yang efektif, pemerintah dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang pada akhirnya mampu meningkatkan output nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

4.3.3 Pengaruh Cukai terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan melalui uji statistik deskriptif, uji akar unit, uji kointegrasi Johansen, dan estimasi Vector Error Correction Model (VECM), diperoleh hasil bahwa penerimaan cukai memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa cukai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan perkembangan aktivitas ekonomi nasional. Sebagai salah satu komponen penerimaan perpajakan, cukai dikenakan atas barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan atau yang memiliki

karakteristik khusus, seperti hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, dan etil alkohol. Meskipun kontribusi cukai terhadap total penerimaan negara relatif lebih kecil dibandingkan pajak lainnya, penerimaan cukai tetap memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan menjaga stabilitas fiskal pemerintah. Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa cukai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diterima.

Penerimaan cukai menunjukkan perkembangan yang cukup baik selama periode penelitian, yang mencerminkan perannya sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Meskipun objek cukai hanya dikenakan pada barang-barang tertentu, keberadaannya tetap memberikan kontribusi terhadap kapasitas fiskal pemerintah. Peningkatan penerimaan cukai mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki sumber pendanaan yang lebih besar untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa cukai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi barang tertentu, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Adefolake dan Omodero (2022) yang menemukan bahwa Petroleum Profit Tax (PPT) sebagai salah satu bentuk penerimaan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi apabila dikelola secara efektif. Selain itu, penelitian Saragih (2018) juga menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh

positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Namun hubungan antara cukai dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat langsung karena efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola dan mengalokasikan penerimaan tersebut.

Hubungan antara cukai dan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Teori Keynes. Dalam perspektif teori pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara yang berasal dari cukai dapat digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran produktif yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi. Dana yang diperoleh dari cukai dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta program-program pembangunan lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, menurut teori keyness keberadaan cukai dapat membantu pemerintah dalam menjaga keseimbangan aktivitas ekonomi melalui fungsi fiskalnya. Berbeda dengan pajak pada umumnya yang berorientasi pada penerimaan negara, cukai juga berfungsi mengendalikan konsumsi barang tertentu yang berpotensi menimbulkan biaya sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah dapat mengurangi dampak negatif dari konsumsi barang-barang tersebut sekaligus memperoleh penerimaan yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan.